

PERAN FILSAFAT ILMU TERHADAP ILMU EKONOMI SEBAGAI LANDASAN REKONTRUKSI EKONOMI PANCASILA

Ariefah Sundari

Yuli Sintha Asi

Ana Fitriyatul Bilgies

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Darul'Ulum Lamongan

ariefah.sundari@unisda.ac.id

yulisintha1@gmail.com

anafitriyatulbilgies@unisda.ac.id

ABSTRACT

Philosophy of Science makes a significant contribution to the development of Economics and economic analysis as well as improving the quality of Economists, having the ability to think and behave. The role of Philosophy of science in developing Economics is as a tool for evaluating scientific thinking, as an instrument for reflecting, evaluating, critiquing scientific assumptions and methods, and as a basic logical tool for the scientific method. One solution to deal with various kinds of problems faced by the Indonesian people at this time is by reviving the spirit of Pancasila (Reconstruction). Pancasila is the essence of Indonesia's existence as a country. Pancasila serves as the basis of the state, philosophy, ideology and also as a manifestation of the basic principles for an independent Indonesia. So that it can be realized by uniting determination, action, and integration from various fields as well as skills to achieve the welfare of the Indonesian people.

Keywords: *philosophy of science, Pancasila economy, alternative economy, social welfare*

ABSTRAK.

Filsafat Ilmu memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan Ilmu Ekonomi dan analisis ekonomi serta peningkatan kualitas Ahli Ekonomi, memiliki kemampuan berfikir, bersikap perilaku. Peran Filsafat ilmu dalam mengembangkan ilmu Ekonomi adalah sebagai alat evaluasi pemikiran ilmiah, sebagai instrumen untuk merefleksikan, mengevaluasi, mengkritisi asumsi dan metode ilmiah, dan sebagai alat logika dasar untuk metode ilmiah. Salah satu solusi untuk menghadapi berbagai macam masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia pada saat ini yaitu dengan menghidupkan kembali semangat Pancasila (Rekontruksi). Pancasila adalah merupakan intisari dari keberadaan Indonesia sebagai suatu negara. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara, filsafat, ideologi dan juga sebagai wujud dari prinsip dasar untuk Indonesia yang mandiri. Sehingga bias terwujud dengan menyatukan tekad, tindakan, dan integrasi dari berbagai bidang dan juga keterampilan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Kata kunci: Filsafat Ilmu, Ekonomi Pancasila, Ekonomi Alternatif, Kesejahteraan Sosial

PENDAHULUAN

Memahami filsafat adalah sebuah hal yang tidak bisa dianggap sepele. Karena filsafat adalah studi tentang hakikat realitas dan keberadaan, tentang apa diketahui serta perilaku yang benar dan yang salah. Bisa juga dikatakan filsafat adalah pemikiran manusia yang paling penting karena memiliki cita-cita untuk mencapai makna hidup yang paling hakiki.

Pengertian dari filsafat ilmu didefinisikan oleh *Benyamin (The Liang Gie, 2000)* bahwa filsafat ilmu adalah:

“That philosophic discipline which is the systematic study of the nature of science, especially of its methods, its concept and presuppositions, and its place in the general scheme of intellectual disciplines”. Untuk itu filsafat ilmu adalah cabang pengetahuan filsafat yang merupakan sifat dasar ilmu, khususnya metode, konsep, dan peranggapannya, serta letaknya dalam kerangka umum dari cabang pengetahuan intelektual.

Adapun menurut *Driyarkara*, beberapa penggolongan filsafat adalah sebagai berikut:

1. pengetahuan: Logika yang memuat logika formal yang mempelajari asas-asas atau hukum-hukum memikir, yang harus ditaati supaya dapat berfikir dengan benar dan mencapai kebenaran serta logika material atau kritika (epistemology) yang memandang isi pengetahuan, bagaimana isi ini dapat dipertanggungjawabkan, mempelajari sumber-sumber dan asal ilmu pengetahuan, alat-alat pengetahuan, proses terjadinya pengetahuan, kemungkinankemungkinan dan batas pengetahuan, kebenaran dan kekeliruan, metode ilmu pengetahuan, dan lain-lain.

2. Keberadaan: ontology atau Metafisika yang membahas apa artinya ada, apakah tujuan, apakah kesempurnaannya, apakah sebab akibatnya, dan apa yang merupakan dasar yang paling dalam pada setiap barang yang ada.
3. Dunia material: Kosmologi.
4. Manusia: Filsafat tentang manusia disebut juga anthropologia metafisika.
5. Tentang kesusilaan: Etika atau filsafat moral.
6. Tuhan atau theologia naturalis: Merupakan konsekuensi terakhir dari seluruh pandangan filsafat.

Menurut *Archie J. Bahm* dalam bukunya, *Axiology: The Science of Values* dalam satu babnya tentang what is “science” menguraikan hakikat ilmu pengetahuan, dengan mengajukan pertanyaan mendasar tentang apakah ilmu pengetahuan itu? Hal tersebut mengingatkan secara “ontis” pada dasarnya Epistemologi. Yang mana dapat dipahami, bahwa “Ilmu pengetahuan mengandung 6 unsur yaitu: adanya *sikap, aktivitas, masalah, metode, sistematika, dan kesimpulan*”.

Pergumulan pemikiran ekonomi dalam pembangunan ekonomi Indonesia menjadi topik yang tidak pernah habis untuk didiskusikan. Indonesia merupakan negara **Emerging Market** dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan diperhitungkan di pasar global. Akan tetapi dalam beberapa tahun terakhir terlihat jelas bahwa bangunan ekonomi Indonesia sangat rapuh, dimana ketika terjadi krisis ekonomi global di Amerika Serikat dan Eropa, ternyata menular ke Asia dan menurunkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Apalagi sekarang adanya dampak dari kasus Virus Covid 19 yang sangat berpengaruh pada Ekonomi di Indonesia.

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yang berawal dari Wuhan, Tiongkok telah

menjadi permasalahan global yang membutuhkan penanganan bersama. Virus COVID-19 yang mulai merebak pada akhir tahun 2019 telah menyebar ke hampir seluruh negara di dunia dan menyebabkan pandemi global. Pandemi COVID-19 yang disebabkan oleh virus corona bukan hanya menimbulkan isu kesehatan di tingkat global, namun juga menyebabkan terhentinya sebagian besar aktivitas, baik sosial maupun ekonomi. Pandemi COVID-19 menjadi tantangan terberat bagi perkembangan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan dunia. Kondisi tersebut menambah berat tantangan ekonomi yang harus diatasi bangsa Indonesia, guna mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia menjadi negara maju, adil dan sejahtera.

KAJIAN PUSTAKA

Ruang Lingkup Filsafat Ilmu

Filsafat ilmu telah berkembang pesat pada tahun Sembilan puluhan sehingga menjadi bidang pengetahuan yang sangat luas dan mendalam. Sebagaimana dibahas oleh para filsuf yang dapat dikemukakan secara ringkas oleh sejumlah ahli antara lain:

1. **Menurut Peter Angeles:** Filsafat ilmu mempunyai empat bidang konsentrasi yang utama:
 - a. Telaah mengenai berbagai konsep, pranggapan dan metode ilmu berikut analisis, perluasan dan penyusunannya dalam memperoleh yang lebih baik dan cermat.
 - b. Telaah mengenai saling keterkaitan berbagai ilmu.
 - c. Telaah mengenai proses penalaran dalam ilmu beserta strukturnya.
 - d. Telaah mengenai akibat pengetahuan ilmiah bagi hal-hal yang berkaitan dengan penerapan dan pemahaman manusia.

2. **Menurut A. Cornelius Benjamin:** filsafat ilmu dibagi dalam empat bidang:

- a. Yang berlawanan dengan sejarah ilmu
- b. Yang berlawanan dengan filsafat ilmu kemanusiaan.
- c. Yang berlawanan dengan epistemologi ilmu.
- d. Yang berlawanan dengan telaah masalah filsafati dari sesuatu ilmu khusus.

3. **Menurut Israel Scheffter:** Filsafat ilmu dibagi menjadi tiga bidang yaitu:

- a. Peranan ilmu dalam masyarakat.
- b. Dunia sebagaimana digambarkan oleh ilmu.
- c. Landasan-Landasan ilmu.

4. **Menurut J.J.C. Smart:** Filsafat Ilmu dibagi dua komponen utama yaitu:

- a. penggunaan ilmu untuk membantu memecahkan masalah
- b. Pembahasan Metodologi dan Analisis ilmu.

PEMBAHASAN

Pengaruh Filsafat Ilmu dalam Ilmu Ekonomi

Bagaimana ilmu ekonomi sangat dipengaruhi oleh filsafat? dimulai dengan definisinya, Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Ilmu ini muncul karena adanya masalah ketidakseimbangan antara kebutuhan dan keinginan manusia yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas.

Maka dalam praktiknya perlu diatur dalam mengolah sumber daya yang terbatas tadi agar mampu mencukupi semua orang. Peran pemerintah yang terdapat dalam pasal 33 UUD 1945 ayat 1 sampai 5, secara jelas menjabarkan sumber daya

yang terbatas tadi diatur oleh pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara maupun perusahaan swasta yang diizinkan beroperasi oleh pemerintah. Mekanisme perusahaan dalam memproduksi dan menjual hasil output terjadi sesuai dengan kondisi mekanisme pasar akan tetapi tetap dibatasi oleh pemerintah melalui regulasi-regulasinya. Selain itu tenaga kerja juga menjadi salah satu faktor input bagi perusahaan yang juga diberikan regulasi oleh Menteri Ketenagakerjaan yang merupakan representatif pemerintah dalam praktiknya. Mulai dari proses penerimaan buruh atau karyawan, hak dan kewajiban bekerjanya, upah atau gaji yang di terima, sampai ketika di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) atau pensiun nanti. Semua ini diatur oleh regulasi yang dibuat oleh pemerintah ditahun 2017 yg dibuat oleh Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo.

Persoalan-persoalan ekonomi yang timbul Banyak berkaitan dengan aspek aksiologis dalam perkembangan ilmu ekonomi seperti masalah yang ada yaitu: *tanggung jawab sosial perusahaan, peningkatan mutu hidup, peningkatan taraf hidup, pelestarian lingkungan hidup, perkembangan teknologi, pengangguran tenaga kerja, yang semakin rumit dimana keterampilan dan keahlian tenaga kerja tidak sesuai dengan tuntutan dunia usaha.*

Misalkan Perusahaan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kerja, sering berakibat terhadap penggunaan teknologi canggih dan pengurangan tenaga kerja. Langkah tersebut mengakibatkan tingkat pengangguran yang tinggi, daya beli rendah serta terjadinya kesenjangan sosial. Kemudian juga pada pelestarian lingkungan hidup, yang mana manufaktur beroperasi masih acuh terhadap keberlangsungan ekosistem sekitarnya. Masalah tanggung jawab sosial ini merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh pihak manajer perusahaan

terhadap lingkungan di sekitarnya. Dijalinnnya hubungan baik maka akan membantu kelancaran operasional perusahaan, dimana masyarakat sekitar akan ikut bertanggung jawab atas keamanan perusahaan dan sebaliknya perusahaan akan memberikan bantuan dan dukungan kepada masyarakat.

Masalah peningkatan mutu kehidupan, dikaitkan dengan tuntutan masyarakat agar harkat dan martabatnya diakui dan dihargai merupakan tantangan yang nyata. Dalam interaksi antara karyawan dengan pihak manajemen menuntut harus tercermin pengakuan dan penghargaan tersebut.

Peranan filsafat ilmu sebagai dasar pengembangan ilmu ekonomi dalam meningkatkan mutu para ekonom-ekonom sangat penting untuk dipikirkan sebagai prasyaratnya, seperti *landasan ontologis*, yaitu yang berhubungan dengan materi yang menjadi obyek telaah ilmu. Filsafat ilmu membimbing agar calon ilmuwan ekonomi tidak salah menentukan hakekat apa yang dikaji. *Landasan epistemologis* yaitu membimbing dalam proses untuk memperoleh pengetahuan ilmiah di bidang ekonomi. Kegiatan dalam mencari pengetahuan tentang obyek apapun termasuk manusia dalam hubungannya benda/jasa untuk memenuhi kebutuhannya, selama hal itu terbatas pada obyek empiris dan pengetahuan tersebut diperoleh melalui metode keilmuan, maka sah disebut keilmuan. *Landasan aksiologi* yaitu membimbing dalam membahas manfaat dari ilmu pengetahuan ekonomi yang didapatkan. Di sini pada cendekiawan ekonomi harus mampu menilai antara yang baik dan buruk, sehingga ilmuwan harus memiliki moral yang kuat agar kemajuan ilmu yang dihasilkan tidak menjadi momok yang mengancam kehidupan manusia itu sendiri.

Bagi seorang yang mempelajari ilmu filsafat diperlukan pengetahuan dasar yang memadai tentang ilmu, baik ilmu alam maupun ilmu sosial, supaya para ilmuwan memiliki landasan yang kuat. Menyadarkan para ilmuwan agar tidak terjebak ke dalam pola pikir statis, yakni hanya berpikir murni dalam bidangnya saja, tidak mengaitkan dengan kenyataan yang ada. Yang mana setiap aktivitas keilmuan tidak bias dilepaskan dari konteks kehidupan sosial bermasyarakat. Apabila hal ini dapat dicapai berarti bahwa filsafat ilmu benar-benar memberikan kontribusi terhadap peningkatan pada para ilmuwan ekonomi. Sebab dengan mempelajari filsafat ilmu para ilmuwan ekonomi akan menyadari keterbatasan dirinya sendiri dan tidak terperangkap pada sikap arogansi intelektual. Selain itu hal yang tak kalah pentingnya adalah adanya sikap keterbukaan diri di kalangan sarjana ekonomi, sehingga dapat mengarahkan seluruh potensi keilmuannya untuk kesejahteraan umat manusia dan lingkungannya.

Perkembangan Ilmu Ekonomi

Persoalan ekonomi telah dipikirkan orang sejak jaman sebelum masehi. diantaranya adalah Aristotels (300 tahun sebelum masehi) telah menulis tentang harga, nilai, pasar, keuangan negara, efisiensi tenaga kerja dan sebagainya. Namun pemikiran yang sistematis mengenai ilmu ekonomi muncul pada abad 18 oleh orang Skotlandia (Rahardja, 2000) yaitu:

Adam Smith (1723-1790) dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 1776 dengan judul "An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations". Adam Smith dianggap sebagai bapak ekonomi, karena telah merumuskan pokok-pokok masalah, pengertian dasar, dan kerangka berfikir yang selanjutnya menjadi dasar teori ilmu ekonomi modern. Dalam buku tersebut dibahas juga mengenai bagaimana menentukan tingkat kemakmuran suatu bangsa dan taraf kemakmuran rakyat dapat

ditingkatkan serta didistribusikan yang berjudul "The Wealth of Nations". Akan tetapi teori tersebut tidak mampu mengatasi kendala perkembangan ekonomi dunia yang pada tahun 1930 mengalami depresi.

Sehingga muncul teori baru yang dikemukakan oleh orang Inggris John Maynard Keynes (1883-1946) dengan bukunya yang berjudul "The General Theory of Employment, Interest and Money" yang diterbitkan pada tahun 1936. Kemudian teori tersebut menjadi titik tolak ilmu ekonomi modern.

Perbedaan pokok antara teori Adam Smith dan teori John Maynard Keynes adalah peranan (campur tangan) pemerintah. Yang mana pada teorinya Adam Smith tidak melibatkan pemerintah untuk menstabilkan ekonomi negara. Sedangkan J. M. Keynes mengutarakan bahwa peranan pemerintah sangat menentukan kestabilan ekonomi.

Selanjutnya teori-teori tersebut dikembangkan dengan berbagai penelitian yang kemudian ilmu ekonomi dibedakan menjadi 2, yaitu (Rahardja, 2000).

- 1) Economic Theory adalah analisis ekonomi yang menjelaskan, mencari pengertian, hubungan sebab akibat, dan cara kerja sistem perekonomian. Ekonomi teori ini dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu: (1) ilmu ekonomi makro, yaitu ilmu ekonomi yang mempelajari fungsi ekonomi secara keseluruhan. Yang mana kita menyelidiki ekonomi melalui suatu lensa sudut lebar. dengan meneliti bagaimana tingkat dan pertumbuhan output ditetapkan, menganalisis inflasi dan pengangguran, mempertanyakan seberapa besar jumlah uang beredar, dan menyelidiki mengapa beberapa negara mengalami perkembangan pesat sementara lainnya mengalami stagnan. (2) ilmu ekonomi mikro, yaitu ilmu yang secara khusus

mempelajari tentang bagian-bagian dari keseluruhan kegiatan perekonomian seperti perusahaannya, pasar, harga barang, sumber daya ekonomi dan sebagainya.

- 2) Applied Economics, ilmu ekonomi terapan adalah penggunaan kerangka pengertian dari analisis ekonomi teori untuk merumuskan kebijakan-kebijakan, pedoman-pedoman yang tepat untuk mengatasi masalah ekonomi tertentu.

Inti dari ilmu ekonomi adalah adanya fakta kelangkaan barang atau jasa yang diminta, karena keinginan konsumsi melebihi kapasitas yang dapat diproduksi. Dengan teori-teori ekonomi yang ada manusia didorong menerapkan teori tersebut untuk memilih di antara barang-barang yang terbatas jumlahnya untuk diproduksi dengan sumber-sumber daya yang dimiliki.

Ekonomi Pancasila

Mubyarto (1987) mendefinisikan Ekonomi Pancasila adalah sebagai sistem ekonomi, atau sistem perekonomian yang dijiwai oleh ideologi Pancasila, yaitu ekonomi yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong nasional. Mubyarto menekankan kegotongroyongan nasional, bukan hanya kegotongroyongan pedesaan, di rukun kampung, tetapi kegotongroyongan pada tingkat nasional.

Pertanyaan dasar kita adalah apakah Ekonomi Pancasila itu ada? Bagaimana bentuknya? Bukankah yang ada itu hanyalah ekonomi kapitalis? Mubyarto dalam buku *Ekonomi Pancasila* mengangkat sebagian pesimisme orang yang menyebutnya Ekonomi Pancasila itu bagaikan suatu teori, atau gambar yang tidak mungkin ada dalam dunia. Yang mana disebabkan karena sistem Ekonomi Pancasila yang digambarkan sangat bertolak belakang dengan realita ekonomi

dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat. Yang dihadapi masyarakat adalah sistem ekonomi yang bertolak belakang dengan asas kekeluargaan dan kegotongroyongan nasional.

Mengenai Ekonomi Pancasila, Mubyarto (1987) mengemukakan lima karakter. Kelima karakter tersebut masih harus diolah, digarap, dikembangkan, ditumbuhkan, dan diperjuangkan. Kelima ciri itu diserap dari UUD 1945 dan dari keseluruhan jiwa Pancasila itu sendiri. Kelimanya adalah sebagai berikut;

1. Dalam sistem ekonomi Pancasila, koperasi merupakan tiang perekonomian. Koperasi merupakan salah satu bentuk paling konkret dari usaha bersama. Dalam pasal 33 UUD 1945 disebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Kalau Bung Hatta menyebut koperasi adalah asas kekeluargaan. Sejak tahun 1980an komitmen pemerintah pada koperasi semakin menunjukkan titik terangnya. Hal ini dapat terlihat dengan terbentuknya menteri khusus, Menteri Muda Urusan Koperasi. Mubyarto menyebut koperasi itulah soko guru perekonomian Pancasila;
2. Perekonomian digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial, dan moral. Ekonomi Pancasila merespons makin parahnya degradasi moral bangsa dalam wujud semakin banyaknya perilaku ekonomi (bisnis) yang mengabaikan nilai-nilai moral, etika, dan keagamaan. Yang disebabkan karena semakin meluasnya paham individualisme, monopoli, dan liberalisme yang makin menjauhkan ilmu dan sistem ekonomi dari moral dan sosial. Ekonomi Pancasila bertekad untuk mengembalikan hakikat ilmu ekonomi sebagai ilmu moral dan

memperjuangkan revolusi moral ekonomi sehingga roda ekonomi bangsa dapat digerakkan oleh rangsangan ekonomi, moral, dan sosial.

Salah satu contoh upaya yang sudah dilakukan untuk menggerakkan masyarakat di level keluarga, yaitu melalui Pos Pemberdayaan Keluarga yang berupa forum silaturahmi, komunikasi, advokasi, edukasi, informasi, dan sekaligus dikembangkan menjadi wadah koordinasi kegiatan penguatan fungsi-fungsi keluarga secara terpadu. Hal ini bertujuan agar keluarga mampu membangun dirinya menjadi keluarga sejahtera, mandiri, dan tangguh menghadapi masa depan. Yaitu merupakan wahana pemberdayaan delapan fungsi keluarga secara terpadu, utamanya fungsi agama, budaya, perlindungan, cinta kasih, reproduksi dan kesehatan, pendidikan, ekonomi atau wirausaha, dan terakhir fungsi lingkungan. Tujuan pembentukan Posdaya adalah untuk menyegarkan modal sosial, seperti hidup bergotong-royong dalam masyarakat guna membantu pemberdayaan keluarga secara terpadu dan membangun keluarga bahagia dan sejahtera. Selain itu, Posdaya juga ikut memelihara lembaga sosial kemasyarakatan yang terkecil, yaitu keluarga, agar dapat menjadi perekat sehingga tercipta kehidupan rukun dan damai. Rintisan awal Posdaya dilakukan oleh Yayasan Dana Sejahtera Mandiri (Damandiri) bekerja sama dengan berbagai pihak seperti perguruan tinggi dan pemerintah daerah.

3. Egalitarianisme, kehendak yang dari seluruh masyarakat Indonesia

ke arah keadaan pemerataan sosial. Ekonomi kapitalis punya jargon saya untung, kamu melarat. Sedangkan, ekonomi Pancasila tidak memiliki semangat seperti itu. Ekonomi Pancasila tidak punya semangat monopoli, mencari keuntungan sendiri, memeras orang lain, dan menindas yang lain. Ekonomi Pancasila membawa spirit kekeluargaan dan solidaritas. Dengan spirit kekeluargaan dan solidaritas, jurang antara kaya dan miskin tidak terlalu lebar seperti pada ekonomi kapitalis. Ekonomi kapitalis menciptakan jurang pemisah antara yang kaya dan miskin.

4. Ada kaitannya dengan sila Persatuan Indonesia. Prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh. Artinya, nasionalisme menjiwai setiap kebijaksanaan ekonomi Indonesia. Hal ini berbeda dengan ekonomi kapitalis yang bersifat internasional, sejauh-jauhnya mencari pasar, kalau perlu di luar batas negara. Itulah yang dilakukan oleh Multi National Corporation (MNC) di mana batas negara tidak menjadi masalah, tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Ekonomi Pancasila memberikan legitimasi bagi ekonomi nasional, bukan ekonomi internasional.
5. Dalam ekonomi Pancasila terdapat ketegasan mengenai keseimbangan antara perencanaan sentral (nasional) dengan tekanan pada desentralisasi di dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan ekonomi. Artinya, ada keseimbangan yang jelas antara perencanaan pada tingkat nasional dengan desentralisasi dari rencana-rencana pusat tersebut di daerah-daerah.

Mubyarto (1987) menyadari kelima ciri Ekonomi Pancasila yang telah disebutkan di depan masih kelihatan hipotesis, ideal, mimpi, dan teoritik. Namun, kalau tidak dimimpikan, semuanya pasti tidak ada. Imajinasi bersama adalah awal dari suatu kenyataan.

Wakil Presiden Republik Indonesia, yang juga ekonom, Boediono mengandalkan Ekonomi Pancasila. Dalam buku "Ekonomi Indonesia, Mau ke Mana?" (Boediono, 2010), ia menerangkan gagasan tentang Ekonomi Pancasila. Ekonomi Pancasila memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Adanya peran dominan koperasi dalam kehidupan ekonomi. Di bidang-bidang yang tidak bisa dikelola secara efisien dalam bentuk koperasi, perusahaan negara memegang peranan, dan bidang-bidang yang tidak bisa diusahakan secara efisien oleh kedua badan usaha tersebut, dalam prinsip maupun praktek, perusahaan swasta mengambil peranan. Namun, semua bentuk badan usaha dalam Ekonomi Pancasila harus didasarkan pada asas kekeluargaan dan prinsip harmoni, dan bukannya pada asas kepentingan pribadi dan prinsip konflik kepentingan.
2. Diterapkannya rangsangan-rangsangan yang bersifat ekonomis maupun moral untuk menggerakkan roda perekonomian. Hal tersebut bersumber dari pandangan bahwa manusia bukan hanya economic man, melainkan juga social and religious man. Sifat manusia yang terakhir ini bisa dikembangkan setaraf dengan sifat yang pertama sebagai sumber kegiatan duniawi (ekonomi). Motif mengoptimalkan terpenuhinya kepentingan pribadi dan oportunistik bukan lagi satu-satunya motif atau bukan lagi motif yang paling kuat bagi berputarnya roda kegiatan ekonomi.
3. Adanya kecenderungan dan kehendak sosial yang kuat kearah egalitarianism atau pemerataan sosial. Cita-cita Ekonomi Pancasila menunjukkan kesamaan dengan doktrin dasar hampir semua agama besar yang ada maupun dengan cita-cita yang terkandung dalam sistem ekonomi sosial sekuler.
4. Diberikannya prioritas utama pada terciptanya suatu perekonomian nasional yang Tangguh. Ekonomi Pancasila menyadari bahwa unsur nasionalisme ekonomi merupakan kenyataan hidup yang tidak bisa pungkiri. Kalau kita jujur melihat kenyataan maka akan terlihat pada teori liberalisme maupun teori sosialisme, yang mendasarkan pada konsep kosmopolitanisme dan solidaritas internasional, yang terlalu sering menjadi sumber kemunafikan bagi praktisi-praktisinya. Setidaknya dari segi ini kedua isme besar tersebut adalah utopia.
5. Pengendalian pada sistem desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi, yang diimbangi dengan perencanaan yang kuat sebagai pengarah bagi perkembangan ekonomi. Yang dicerminkan dalam cita-cita koperasi. Bentuk usaha ini merupakan kristalisasi cita-cita untuk mencapai keseimbangan antara sentralisme dan desentralisme dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Landasan Hukum Ekonomi Pancasila

Kelahiran Ekonomi Pancasila sebenarnya sudah setua Republik Indonesia. Alasannya adalah Pancasila dan UUD

1945 yang merupakan muasal Ekonomi Pancasila tercetus pada saat terbentuknya Indonesia sebagai sebuah bangsa yang berdaulat. Dalam Pancasila, sumbernya terdapat pada Sila Kelima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sedangkan dalam UUD 1945, sumbernya ada pada Pasal 27 (2), Pasal 33, dan Pasal 34, Pasal 27 (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Limbong, 2011). Pasal 33 (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Eksistensi Ekonomi Pancasila sudah ada dengan Pancasila sebagai landasan idealnya dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional. Penjabaran keduanya lebih lanjut dijelaskan dalam tap MPR/S (GBHN), UU dan Peraturan Pemerintah. GBHN sendiri merupakan arah dan kebijakan negara dalam penyelenggaraan pembangunan, termasuk pembangunan ekonomi. Intinya, dalam keseluruhan GBHN 1973–1998, pembangunan ekonomi nasional didefinisikan sebagai berikut:

1. Keseluruhan semangat, arah dan gerak pembangunan dilaksanakan sebagai pengamalan dari semua sila Pancasila secara serasi dan sebagai kesatuan yang utuh yang meliputi

pengamalan semua sila dalam Pancasila.

2. Pembangunan nasional dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, dan berlanjut untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju.
3. Dalam kaidah penuntun disebutkan bahwa pembangunan ekonomi harus selalu mengarah pada mantapnya sistem ekonomi nasional berdasarkan Pancasila dan UUD-1945 yang disusun untuk mewujudkan demokrasi ekonomi yang harus dijadikan dasar pelaksanaan pembangunan. Terdapat 8 ciri positif dan 3 ciri negatif yang harus dihindari, yaitu: (a) perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan, (b) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak dikuasai oleh negara, (c) bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, (d) sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan permuakafan lembaga perwakilan rakyat serta pengawasan terhadap kebijakannya ada pada lembaga perwakilan rakyat pula, (e) warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak, (f) hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat, (g) potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan

- sepenuhnya dalam batas yang tidak merugikan kepentingan umum, (h) fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Sedang 3 ciri negatif yang harus dihindari adalah; (i) sistem free fight liberalism yang menumbuhkan eksploitasi manusia dan bangsa lain yang sejarahnya di Indonesia telah menumbuhkan dan mempertahankan kelemahan struktural posisi Indonesia dalam ekonomi dunia, (ii) sistem etatisme dalam negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor Negara, dan (iii) pemusatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.
4. Pelaksanaan pembangunan jangka panjang kedua diarahkan untuk tetap bertumpu pada trilogi pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dibutuhkan untuk menggerakkan dan memacu pembangunan di bidang lain sekaligus sebagai kekuatan utama pembangunan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasilnya dengan lebih memberi peran kepada rakyat untuk berperan serta dalam pembangunan, dijiwai semangat kekeluargaan, didukung oleh stabilitas nasional yang mantap dan dinamis melalui pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
 5. Dalam kebijakan umum, pembangunan di bidang ekonomi diarahkan pada pemantapan sistem ekonomi Pancasila sebagai pedoman mengembangkan perekonomian nasional yang berkeadilan dan berdaya saing tinggi yang ditandai oleh makin berkembangnya keanekaragaman industri di seluruh wilayah Indonesia.
 6. Pembangunan usaha nasional yang terdiri atas Koperasi, BUMN, dan Swasta diarahkan agar tumbuh dan berkembang sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dalam mekanisme pasar terkelola yang dijiwai, digerakkan, dan dikendalikan dalam sistem Ekonomi Pancasila.
 7. Usaha negara perlu terus diperbaiki dan dipertahankan kinerjanya agar mampu melaksanakan fungsi dan perannya: memberdayakan pengusaha kecil, menengah, dan koperasi. Usaha nyata yang kegiatannya menyangkut kepentingan negara dan menguasai hajat hidup orang banyak perlu dikelola secara produktif dan efisien untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan untuk memantapkan perwujudan demokrasi ekonomi.
- Sementara itu, di level UU kita dapat melacak antara lain dari UU No. 12/67 tentang perkoperasian, UU No. 6/74 tentang ketentuan pokok kesejahteraan, UU No. 4/79 tentang kesejahteraan anak, UU No. 4/28 tentang pengelolaan lingkungan berbasis kesejahteraan rakyat, UU No. 3/89 tentang telekomunikasi untuk kesejahteraan bangsa dan kemakmuran rakyatnya, UU No. 10/92 tentang pembangunan keluarga sejahtera, UU No. 21/92 tentang pelayaran untuk kemakmuran rakyat, UU No. 25/92 tentang pembangunan Koperasi, UU No. 7/92 tentang perbankan yang sehat dan mitra ekonomi rakyat, UU No. 9/95 tentang usaha kecil, UU No. 7/96 tentang pangan, UU No. 19/2003 tentang BUMN UU No. 7/2004 tentang sumber daya air milik Negara untuk rakyat, UU No. 18/2004 tentang perkebunan, UU No. 31/2004 tentang perikanan, , UU No. 38/2004 tentang pembangunan jalan

sebagai tanggung jawab Negara, dan lainnya.

Moralitas Ekonomi Pancasila

Dalam buku Ekonomi Pancasila, Gagasan dan Kemungkinan, Mubyarto (1987) menjelaskan tentang renggangnya hubungan antara ekonomi dan keadilan. Dia menulis saya merasa bahwa hubungan antara ekonomi dan keadilan ternyata agak jauh. Lebih-lebih apabila melihat apa yang ada di sekitar, yaitu kebijaksanaan ekonomi yang ditempuh banyak negara, termasuk Indonesia.

Pancasila, yang sudah menjiwai bangsa, memiliki unsur moral, sistem nilai, semangat supporting, memberikan dasar, dan sistem kepada Ekonomi Pancasila. Maka dari itu Moralitas Ekonomi Pancasila didefinisikan sebagai kesatuan ukuran atau norma-norma yang mengatur pola berpikir dan pola bertindak dari pelaku-pelaku ekonomi dalam sistem Ekonomi Pancasila. Secara spesifik Mubyarto menjelaskan ekonomi yang bermoral Pancasila itu sebagai berikut: (1) Suasana usaha bersama harus berdasarkan kekeluargaan. Dan itulah koperasi. Di Indonesia, komitmen pemerintah untuk mengembangkan usaha koperasi terbilang cukup tinggi. (2) Ekonomi Pancasila mengedepankan rangsangan moral dan sosial. Kalau ekonomi klasik dan neoklasik mendasarkan rangsangan ekonomi untuk menggerakkan perekonomian, Ekonomi Pancasila justru meng-akomodasi dimensi moral dan sosial. Untuk penguatan dimensi moral dan sosial ini maka peran agama menjadi sangat signifikan. Agama adalah menjaga dan sumber utama nilai-nilai moral. Oleh sebab itu, nilai-nilai tersebut harus mengental dalam diri setiap produsen dan konsumen. (3) Nasionalisme harus menjiwai semua pelaku ekonomi. Perasaan nasionalisme harus berada dalam jiwa setiap koperasi maupun businessman, perusahaan negara, dan juga para pejabat

yang menjalankan perusahaan. Konsep nasionalisme memiliki kaitan kuat dengan ketahanan negara.

Identifikasi Pemikiran Ekonomi Pancasila sebagai ciri kepribadian bangsa mampu menghubungkan asas keTuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Kelima sila ini inheren termuat dalam sistem Ekonomi Pancasila dengan ciri-ciri:

1. Roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral;
2. Kehendak kuat dari seluruh masyarakat ke arah pemerataan sosial (egalitarianism), sesuai asas-asas kemanusiaan;
3. Prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh, yang berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijakan ekonomi;
4. Koperasi merupakan tiang perekonomian dan merupakan bentuk yang paling konkret dari usaha bersama;
5. Adanya imbalan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dengan desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi untuk menjamin keadilan ekonomi dan sosial (Mubyarto, 1987).

Dengan penjelasan sebagai berikut: Rangsangan kegiatan ekonomi yang dimaksudkan pada poin pertama adalah dorongan kegiatan ekonomi yang diintrodusir oleh sistem nilai dan sistem pemikiran yang menggambarkan nilai-nilai dasar yang ditegakkan dalam octus ekonomi. Nilai-nilai moral seperti tenggang rasa, pengendalian diri, gotong royong, dan semangat kekeluargaan menjadi semangat dasar dalam berekonomi. Pengejaran keuntungan ekonomi hanya boleh terjadi dalam koridor nilai-nilai dasar itu. Dengan kata lain, manusia, siapapun dia, tidak boleh dipakai

sebagai alat atau instrument mendapat keuntungan ekonomi. Aktivitas perekonomian harus memuliakan manusia. Egalitarianisme yang dimaksudkan disini adalah bahwa pemerataan sosial mengandaikan terpenuhinya semangat kekeluargaan, saling mengasihi sesama manusia, dan solidaritas. Inilah poin-poin yang merupakan manifestasi dari Sila Kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab). Berdasarkan pengalaman bangsa Indonesia, solidaritas akan kuat seandainya ada perasaan senasib, terutama saat menderita. Sebaliknya, solidaritas akan menipis ketika orang hidup dalam kemakmuran. Hal ini tidak berarti supaya kita hidup menderita terus agar solid satu sama lain.

Semangat nasionalisme, terutama di bidang politik dan ekonomi, sangat kuat ketika menantang penjajahan Belanda dan Jepang. Semangat nasionalisme itu mengental dalam diri masyarakat, baik yang ada di pusat maupun di daerah-daerah. Namun akhir-akhir ini semangat nasionalisme itu melorot karena banyaknya kebijakan yang lebih pro asing ketimbang pro rakyat. Misalnya, munculnya sekitar 80an UU yang merupakan pesanan asing. Kita seharusnya tidak menunggu sampai kita menderita akibat kebijakan yang lebih pro asing. Masyarakat harus bangkit melawan penjajah yang bersembunyi di balik jargon-jargon kesejahteraan rakyat.

Pemikiran dasar pasal 33 UUD 1945 berasal dari Bung Hatta. Terkait pasal ini, Hatta menegaskan Politik perekonomian berjangka panjang meliputi segala usaha dan rencana untuk menyelenggarakan berangsur-angsur ekonomi Indonesia yang berdasarkan koperasi. Realisasi hasil politik perekonomian berjangka pendek bersumber pada bukti-bukti yang nyata. Sekalipun sifatnya berlainan dari ideal kita bagi masa datang, apabila buahnya nyata mem perbaiki keadaan rakyat dan memecahkan kekurangan kemakmuran

kini juga, tindakan itu sementara waktu harus dilakukan dan dilaksanakan oleh mereka yang sanggup melaksanakannya. Menurut Mubyarto, Hatta membedakan politik ekonomi dengan tujuan ekonomi. Sistem ekonomi Indonesia adalah koperasi. Baik Hatta, Soeharto, dan Mubyarto mengungkapkan bahwa sistem tersebut belum berlaku hingga tahun 80an. Nanti kita akan melaksanakan sistem ekonomi koperasi secara penuh. Sebelumnya, pada tahun 1977 Bung Hatta menjelaskan tentang sistem perekonomian Indonesia. Dia mengatakan Pada masa yang akhir ini, negara kita masih berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, tetapi politik perekonomian negara di bawah pengaruh teknokrat sekarang, sering menyimpang dari dasar itu. Politik liberalisme sering dipakai sebagai pedoman.

Dasar Politik Ekonomi Indonesia

Pemikiran dasar pasal 33 UUD 1945 berasal dari Bung Hatta yang seharusnya menjawai para penentu kebijakan dalam merumuskan politik ekonomi, baik yang berjangka pendek, menengah, dan panjang. Di dalamnya tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran anggota masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran individu atau korporasi tertentu, karena perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan prinsip ini adalah koperasi.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan tentang filsafat ilmu dan peranan filsafat ilmu sebagai dasar dan arah pengembangan ilmu ekonomi, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Filsafat ilmu sebagai cabang dari ilmu filsafat dan sekaligus sebagai "Mother of Science" berperan memberikan ide atau pondasi dasar peletakan ilmu-ilmu pada umumnya

termasuk ilmu ekonomi. Sebagaimana fungsinya filsafat akan memberikan dasar-dasar dan sekaligus semua ilmu secara hakiki akan kembali kepada induknya.

Filsafat ilmu diperlukan kehadirannya di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat. Sekarang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tergantung pada perkembangan yang cepat dan metodologi baru yang berkaitan dengan bermacam-macam masalah yang pelik dan dinamis.

Filsafat ilmu berperan besar terhadap pengembangan ilmu ekonomi menuju peningkatan ilmu pengetahuan dan peralatan analisis ekonomi serta meningkatkan kualitas ilmuwan yang mampu berfikir, bersikap dan bertindak sebagai ilmuwan yang bijaksana.

Peranan filsafat ilmu terhadap ilmu ekonomi yaitu:

1. Berperan sebagai sarana pengujian penalaran ilmiah;
2. Berperan sebagai sarana memberikan dasar logis terhadap metode keilmuan.
3. Berperan sebagai sarana merefleksi, menguji, mengkritik asumsi dan metode keilmuan

Untuk mengembangkan ilmu ekonomi diperlukan strategi yang tepat dan berjalan seiring dengan spiritualisasi, ekspresi estetika dan sosialisasi nilai-nilai kemanusiaan. Ilmu ekonomi, khususnya di Indonesia harus dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek moral dan etika yang berlaku, sehingga dalam implementasinya dan penerapannya tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, yang bersifat jujur dan transparan serta menjaga keseimbangan serta kelestarian lingkungan alam.

Masyarakat Indonesia sudah mendambakan sekali kehadiran sistem Ekonomi Pancasila bahkan para penentu kebijaksanaan dan pelaksanaannya ingin

mendapat bantuan para ahli untuk merumuskannya. Apabila masyarakat memang sudah benar-benar menginginkannya, sebenarnya dari segi teoritis, satu tahap positif telah terlampaui dan ini berarti sudah ada kebutuhan. Selain itu, seluruh pihak harus bersedia mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan yang lebih besar dari masyarakat secara keseluruhan. Misalnya jangan sampai ada kecenderungan menuju etatisme, monopoli, dan persaingan bebas yang mematikan golongan ekonomi lemah. Betul bahwa hak milik dan kepentingan perorangan diakui dan dijamin, tetapi kalau ia mulai menunjukkan tanda-tanda merugikan kepentingan umum, maka hak dan kepentingan perorangan tersebut harus jelas-jelas dibatasi, untuk memberikan tempat lebih tinggi pada kepentingan masyarakat. Dalam hal yang demikian, norma sosial ditempatkan pada posisi lebih tinggi dari pada ukuran individu.

Ekonomi Pancasila membutuhkan bantuan para ahli teori yang konsisten menggali pikiran-pikiran Indonesia asli melalui penelitian-penelitian yang tekun. Baik teori ekonomi barat, maupun teori ekonomi timur akan membantu usaha penggalian ini. Namun yang akan sangat menentukan bukanlah peralatan-peralatan teori ekonomi tersebut, melainkan pengetahuan mendalam mengenai watak bangsa Indonesia yang sudah tercermin dalam filsafat Pancasila. Para peneliti muda di bidang ekonomi akhirnya akan menyadari, usaha penggalian teori Ekonomi Pancasila tidak akan berhasil bila tidak didasari keyakinan antara eratnya kaitan antara ilmu ekonomi dan ilmu-ilmu sosial lainnya, yaitu ilmu antropologi, sosiologi dan politik, psikologi dan sejarah. Pendekatan transdisiplin harus diterapkan oleh semua ahli ilmu sosial agar penggalian dan penemuan teori tersebut mencapai hasil.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahm, Archi. J. 1980. What is “Sci- ence”, dalam Axiologi: The Science of Val- ues. New Mexico: Word Books, Albuquer- que.
- Barnadib, Imam. 1994. Filsafat Pendi- dikan. Yogyakarta: Andi Offset.
- Gie, The Liang. 2000. Pengantar Filsafat Ilmu. Yogyakarta: Liberty
- Kattsoff, Luis O. 1987. Pengantar Filsafat (alih bahasa Soejono Soemargono). Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Rahardja, Prathama. 2000. Ekonomi. Jakarta: Intan Pariwara
- Samuelson, Paul A & William D. Nordhaus. 1992. Econimics. 14th Edition. New York:
- McGray – Hill .1999. Mikro Ekonomi. Terjemahan edisi keempat belas. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama (Erlangga)
- Boediono. 2010. Ekonomi Indonesia, Mau ke Mana?. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Damanhuri DS. 2010. Ekonomi Politik dan Pembangunan: Teori, Kritik, dan Solusi bagi Indonesia dan Negara Sedang Berkembang. Bogor: IPB Press.
- Enriguez CG. 1986. Structure and Function of Cooperative. Nova Scotia, Canada: Coady International Institute Saint Francis Xavier University Antogonish.
- Lavoie M. 2006. Introduction to Post-Keynesian Economics. New York: Palgrave Macmillian.
- Limbong B. 2011. Ekonomi Kerakyatan dan Nasionalisme Ekonomi. Jakarta: Margaretha Pustaka.
- Mubyarto. 1987. Ekonomi Pancasila: Gagasan dan kemungkinan. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Todaro MP, Smith SC. 2003. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. 8th ed. Jakarta: Erlangga.
- Zukunftsossier (Future Dossier). 2012. Alternative Economics and Sosial Concept. Series Zukunftsossier 3: 1-14.